

Analisis Ketergantungan Belanja Daerah Pemda Surabaya dan Pemda Bandung Tahun 2015-2019

Analysis of Regional Expenditure Dependency on the Regional Government of Surabaya and Bandung Regional Government in 2015-2019

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan dua pemerintahan daerah yang dikenal dengan julukan Green city dan Green Transport: Pemda Surabaya dan Pemda Bandung yaitu 1) pengaruh penerimaan pajak daerah, dana alokasi umum, penerimaan lain yang sah dan biaya pembangunan terhadap belanja daerah, 2) sejauh mana ketergantungan belanja daerah terhadap pendapatan daerah dan 3) Bagaimana kualitas belanja daerah Pemda Bandung dan Surabaya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketergantungan Pendapatan Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah lainnya dan Biaya Pembangunan terhadap Belanja Daerah secara simultan mempunyai pengaruh yang sangat kuat dan besarnya pengaruh sebesar 96,8% dan berpengaruh positif 2). Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kota Bandung dipengaruhi sebesar 85,52% dan Pemerintah Daerah Kota Surabaya sebesar 77,45%. 3) Pemda Surabaya lebih baik dalam hal ketidak tergantungan pada belanja daerah dibandingkan dengan Pemda Bandung.

Abu Bakar

Program Studi
Akuntansi,
Fakultas Ekonomi,
Institut Bisnis dan
Informatika Kosgoro
1957, Jakarta,
Indonesia

Surel Korespondensi:
abubakar00012248@
gmail.com

Kata Kunci : Belanja Daerah, Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Lain-lain Pembiayaan Daerah

Abstract

This research is a qualitative descriptive the objects of the financial statements of the Badung Regional Government and the Surabaya Regional Government financial reports for 2015-2019. This study aims to determine and compare 1) the effect of local tax revenues, general allocation funds, other legitimate revenues and development costs on regional expenditures, 2) the extent to which regional expenditures are dependent on regional revenues and 3) how is the quality of local government expenditures in Bandung and Surabaya. . The results of the study conclude that the dependence of Regional Tax Revenue, General Allocation Funds, other Regional Original Income and Development Costs on Regional Expenditures simultaneously has a very strong influence and the magnitude of the effect is 96.8% and has a positive effect 2). Regional Government Expenditure Bandung City is affected by 85.52% and Surabaya City Government by 77.45%. 3) The local government of Surabaya is better in terms of not being dependent on regional spending compared to the local government of Bendung.

Keywords: Regional Expenditures, Regional Taxes, General Allocation Funds, Other Revenues from Regional Financing.

PENDAHULUAN

Perserikatan Bangsa-Bangsa, menetapkan Surabaya sebagai kota terbaik dunia bersama Kota Mannheim (Jerman) dan Zhejiang Province (China) sebagai tiga kota terbaik dunia untuk kategori untuk kategori "Global Green City".(Andina 2019, 119) Surabaya merupakan salah satu daerah penyelenggara otonomi daerah(Perdana et al. 2020, 339) kota dibagian timur jawa (N. Taguchi, M. Kawabata, M. Maekawa, T. Maruo 2003, 858) kota dengan pengelolaan sampah terbaik (Andina 2019, 120) dan yang memiliki tingkat mortalitas cukup tinggi (N. Taguchi, M. Kawabata¹, M. Maekawa, T. Maruo² 2003, 860) Kota dimana Kinerja UKM dianggap cukup (Ardiana, Brahmayanti, and Subaedi 2010, 52) kota dengan ikon pariwisata (Satrya and Indrianto 2016, 2). Sementara Bandung dengan program *Green Transport* tidak mau kalah dengan kota Surabaya. Bandung dikenal sebagai kota pariwisata internasional (Maylanny and Fauzan 2015, 91) , kota yang pertama kali mendapat opini wajar tanpa pengecualian pada tahun 2018 dari BPK Propinsi. (Fazlurahman, Fatriananda, and Jauhari 2020, 57) Kota yang berada di Jawa Barat memiliki dua gedung bertaraf internasional (Maylanny and Fauzan 2015, 87) dan kota yang berusaha mengikuti Surabaya sebagai kota tanpa plastik (Andina 2019, 122). Bandung juga dikenal kota dengan sejuta sajian *kuliner* (Syarifuddin, M. Noor, and Rohendi 2017, 57) yang oleh masyarakat umum dijuluki sebagai museum arsitektur bangunan kuno, kota seniman, kota pendidikan, kota wisata, kota jasa, kota wisata kuliner, kota kreatif (Indira, Usman Ismanto, and Budiarti Santoso 2013, 45)

Secara financial kedua daerah akan memiliki karakter pendapatan daerah yang tidak akan sama karena basis dasara daerahnya berbeda. Pemda Surabaya sebagai daerah green city berbasis industri dan perdagangan sementara Pemda Bandung yang dikenal sebagai daerah wisata. Pendapatan daerah Pemda Bandung dapat diperkirakan bagian terbesar berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi hotel,hiburan dan Wisata. Sementara Pemda Surabaya bisa diperkirakan memiliki basis pendapatan bukan dari retribusi restoran dan wisata. Dengan berbagai potensi dan nilai lebih masing-masing, pemerintah memberi wewenang daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri sejalan dengan adanya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan. (AKBAR 2016, 32) Prinsip otonomi daerah mulai dari memperhatikan aspek demokrasi hingga menggali berbagai potensi keanekaragaman daerah hingga berusaha meningkatkan kemandirian daerah (Rinaldi 2012, 106) dengan memaksimalkan potensi yang ada (Fazlurahman, Fatriananda, and Jauhari 2020, 57) dengan tujuan mendorong meningkatkan penerimaan dan perbaikan pengelolaan sumber daya (Pangerapan and Wokas 2016, 733) serta lebih aktif dan leluasa dalam melakukan pembiayaan dengan berbagai program. (Pujiono, Sukarno, and Puspitasari 2016) Prinsipnya daerah diberikan hak mengurus dan mengatur diluar urusan pemerintah pusat (Sandy Kawulur, Rosalina A. M. Koleangan 2019, 108) sesuai dengan UU Nomor 32 tahun 2004 (Mosal 2013, 108) yang bertumpu kepada kepentingan publik (Agustina 2013) (Riftiasari 2018, 2)

Otonomi daerah menuntut daerah mampu mengelola kinerja keuangan daerahnya (Wijaya and Suidiana 2016, 1389) sebagai tolak ukur keberhasilan otonomi daerah (Fajar Nugroho 2012, 2). Keberhasilan otonomi daerah akan terlihat dari tingkat ketergantungan belanja daerah terhadap post-post pendapatan tertentu. Sumber penerimaan daerah menurut undang-undang terdiri dari penerimaan daerah yaitu Pajak Daerah, DAU, Penerimaan Yang Sah dan Pembangunan Daerah. Inti dari otonomi daerah Pendapatan Asli Daerah dapat menutupi belanja daerah, tidak terjadi ketergantungan belanja daerah. Ketergantungan tersebut akan terlihat dari laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan adalah tanda pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan (Fazlurahman, Fatriananda, and Jauhari 2020, 57). Laporan yang baik yang dapat memenuhi kriteria dapat diandalkan, relevan dengan kondisi yang ada dan dapat dipahami dan serta dapat dibandingkan.(Kurniati 2016, 1292) Atas dasar pemikiran diatas diperlukan analisis, sampai seberapa besar ketergantungan

penerimaan daerah terhadap belanja kota wisata yang diwakili oleh Pemda Bandung dan kota industri diwakili oleh Pemda Surabaya. Dari pokok permasalahan tersebut dapat diturunkan 1) Seberapa besar pengaruh Pajak Daerah, DAU, Penerimaan Yang Sah dan Pembangunan Daerah terhadap Belanja Daerah 2) seberapa besar tingkat ketergantungan Sumber pembiayaan terhadap Belanja daerah Bandung dan Surabaya Tahun 2015-2019 dan 3) Pemda manakah yang memiliki tingkat ketergantungan lebih baik terhadap belanja daerah?

LANDASAN TEORI

Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Analisis kinerja keuangan dapat dengan berbagai cara, mulai dari analisis komparatif hingga Analisis Break Even. (Fazlurahman, Fatriananda, and Jauhari 2020, 57) Analisis kinerja keuangan dilakukan dengan menilai kinerja di masa lalu hingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas yang diharapkan. (Hidayat 2016, 7) Analisis kinerja keuangan adalah proses peninjauan kritis mulai dari meninjau hingga memberikan solusi keuangan perusahaan untuk periode waktu tertentu (Fazlurahman, Fatriananda, and Jauhari 2020, 57)

Analisis keuangan memerlukan beberapa tolok ukur yaitu rasio keuangan atau indeks keuangan (Hidayat 2016, 7) dengan menggunakan penghitungan rasio-rasio keuangan tertentu (SUSANTO 2010, 77). Tujuan analisa ini untuk mengukur dan mengevaluasi mulai dari kinerja pemerintah hingga mengukur kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya, (Sandy Kawulur, Rosalina A. M. Koleangan 2019)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan adalah hasil akhir dari proses *akuntansi* (Syafri 2011, 205) yang penyusunannya didasarkan pada standar akuntansi pemerintah (Albugis 2016, 79) yang dapat mencerminkan baiknya jalan pemerintahan. (Wati, Herawati, and Sinarwati 2014, 2). Laporan keuangan harus disajikan harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 (Albugis 2016, 80) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus kas dan Catatan Atas sesuai dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 (Urip Santoso 2008, 16) dengan tujuan adanya keandalan dan efektifitas pengelolaan keuangan dan efisiensi pemerintahan. (Pujiono, Sukarno, and Puspitasari 2016, 71) Fungsi laporan keuangan memberi gambaran suatu kondisi pemerintahan dan mewujudkan akuntabilitas keuangannya (As Syifa Nurilah 2014, 2)

Pajak Daerah

Pajak, adalah kontribusi wajib pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang (Undang Nomor 28 Tahun 2009), (Santoso 2014, 14) Pajak daerah biasanya bersumber mulai dari Pajak Hotel, hingga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Surakhman, Djazuli, and Choiriyah 2019, 157). Pajak jenis ini terdiri dari pajak propinsi dan pajak kabupaten. (Riftiasari 2018, 3) dengan perincian 5 jenis pajak dari provinsi dan 11 jenis pajak dari kabupaten/kota. (Butarbutar 2014, 699) Pajak provinsi mulai dari Pajak Kendaraan Bermotor hingga Pajak Rokok. Sementara pajak kabupaten mulai dari Pajak Hotel hingga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Santoso 2014, 15)

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (Kustianingsih, Muslimin, and Kahar 2018, 88) dalam bentuk transfer untuk membantu keuangan daerah (Rusmita 2016, 241) merupakan salah satu dana perimbangan yang telah dialokasikan

pemerintah (Williantara¹ and Budiasih² 2016, 2048) dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah (Marfiana and Kurniasih, n.d., 3)

Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup kebutuhan daerah karena belanja daerah lebih besar daripada penerimaan daerah (Purpitasari 2015, 6) atau membantu menutupi kekurangan fiskal daerah yang alokasinya didasarkan atas jumlah gaji PNS suatu daerah (Leonardus Julyano Sema 2021, 9) dimana besarnya minimal sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri. (Adyatma and Oktaviani 2015, 197) Dalam pelaksanaannya DAU bersifat Block Grant, yang penggunaannya fleksibel dan tidak banyak larangan (Miftahul Abid, Sri Rahayu 2018, 755) serta sangat penting bagi sumber operasional pemerintah dan sebagai sumber pembiayaan pembangunan (Ahmad 2021, 23) sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Munir 2016, 34)

Pendapatan Lain yang Sah

Laporan keuangan Pemda DKI Jakarta mengklasifikasikan pendapatan jenis ini terdiri dari pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat dan pendapatan *lainnya* dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (Hadi and Saputri 2018, 185) UU No. 33 Tahun 2004 memberikan pengertian bahwa Lain-lain penerimaan yang sah adalah bukan termasuk 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana Perimbangan, 3) Pinjaman Daerah (Williantara and Budiasih 2016, 2046). Bukan juga pendapatan yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retrebusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (Sandy Kawulur, Rosalina A. M. Koleangan 2019, 111)

Belanja Daerah

Belanja daerah yang efektif dan efisien, dan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan (Rusmita 2016, 239) Merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah dalam satu tahun anggaran (Purpitasari 2015, 6) mulai dari Pengeluaran rutin mulai dari belanja pegawai, hingga belanja pembangunan. (Setia 2008, 29) Pendapat lain terdiri dari belanja rutin mulai dari belanja investasi hingga pengeluaran tidak terduga. (Rusmita 2016, 242). Tujuan belanja daerah untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk pelayanan wajib dan lain-lain mulai dari pendidikan hingga pelayanan sosial (Marfiana and Kurniasih, n.d., 3)

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup a. SILPA tahun anggaran sebelumnya, b. Pencairan dana cadangan, c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan d. Penerimaan pinjaman serta e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sementara Pengeluaran pembiayaan mencakup :a. Pembentukan dana cadangan, b. Penyertaan modal pemerintah daerah dan termasuk investasi nirlaba pemerintah daerah serta c. Pemberian pinjaman. (Mutiha 2016, 108)

Variabel Operasional Penelitian

Variabel operasional penelitian ini terdiri dari Analisa Kinerja Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pajak Daerah, Dana alokasi Umum, pendapatan lain yang sah dan Belanja Daerah. Tabel dibawah ini variabel operasional penelitian secara lebih rinci

Tabel 1. Variabel Operasional Penelitian

No	Variabel	Definisi operasional	Peneliti
----	----------	----------------------	----------

1	Pajak Daerah	Pajak, adalah kontribusi wajib pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang (Undang Nomor 28 Tahun 2009),	Santoso Surakhman Choiroyah Riftasari Butar-butar
2	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah	Kustianingsih, Wiliantra Marfiana Putpitasari Adyatma Munir
3	Pendapatan Lain yang Sah	pendapatan yang berasal hibah dan pendapatan dana darurat dan pendapatan <i>lainnya serta</i> Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus UU No. 33 Tahun 2004	Hadi dan Saputri Wiliantra dan Budi asih Sandi Kawulur
4	Pembiayaan Daerah	Pembiayaan yang dilakukan pemerintah terhadap suatu daerah yang menandung unsur penerimaan dan pengeluaran	Arthaingan H.Mutiha
5	Belanja Daerah	Merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah dalam satu tahun anggaran mulai dari Pengeluaran rutin mulai dari belanja pegawai, hingga belanja pembangunan.	Purpitasar Setia

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang mengambil tema penelitian sebelumnya adalah sebagaimana dibawah ini

Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Ferdiansyah dan Dwi Risma Deviyanti Salmah yang pada tahun 2018 bertema Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan Dana Alokasi Umum yang berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan tidak pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur

Penelitian kedua dilakukan oleh Rihfenti Ernayani pada tahun Tahun 2017 dengan tema Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013) di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013).Kesimpulan penelitian tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap belanja daerah, dan dana bagi hasil juga mempengaruhi belanja daerah, sedangkan dana alokasi khusus tidak berpengaruh pada belanja daerah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa R-square adalah 0,892 atau 89,2%

Penelitian ketiga dilakukan oleh Andri Devita, Arman Delis dan Junaidi pada tahun tahun 2018 dengan tema Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Penelitian tersebut memberikan kesimpulan PAD dan DAU secara simultan dan parsial dapatmeningkatkan

belanja langsung dan belanja tidak langsung sementara jumlah penduduk mengurangi peningkatan belanja langsung.

Penelitian keempat yang dilakukan pada tahun 2015 oleh Muhammad Nur yang bertema Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah di Sulawesi Selatan. Kesimpulan penelitian tersebut menunjukkan PAD dan DAK secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Sementara DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang mengharuskan peneliti menghadirkan data mayor dan data minor. Data mayor adalah Pendapatan Pajak daerah lokal, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan lain yang sah serta pendapatan pembiayaan daerah Pemda Bandung dan Surabaya. Untuk mengukur dan menganalisis digunakan dua pendekatan yaitu pendekatan statistik dan pendekatan analisa keuangan. Pendekatan analisa keuangan digunakan sebagai pelengkap untuk menjawab masalah penelitian yang tidak bisa dijawab melalui pendekatan statistik seperti berapa persen pengaruh ketergantungan Belanja daerah dari Pendaatan Pajak, DAU belanja, Pendapatan Yang Sah dan Pembangunan Daerah. Dari Permasalahan yang ada penelitian ini pokok permasalahan dapat diturunkan menjadi 1) seberapa besar pengaruh Pendapatan Pajak Daerah, DAU dan pendapatan yang sah dan Pembangunan Derah terhadap Belanja Daerah Pemda Bandung dan Pemda Surabaya. 2) Bagaimana tingkat ketergantungan belanja daerah dari Pendapatan Pakak, DAU dan pendapatan yang sah dan Pembangunan Derah dan 3) Bagaimana perbandingan tingkat ketergantungan Belanja Daerah Pemda Bandung dan Surabaya

Pendekatan Statistik dan Hipotesis Penelitian

Uji Stistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji hipotesis, yaitu uji Anova, Koefisien determinan (R²) dan Regresi Linear Berganda. Uji Linear Berganda digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh pendapatan pajak hotel, restoran dan hiburan terhadap Pendapatan Asli daerah secara simultan. Hipotesis awal untuk memperkuat pendekatan keuangan sebagaimana dibawah ini

H1= Ada pengaruh positif pendapatan pajak daerah terhadap Belanja Daerah Pemda Bandung dan pemda Surabaya

H2 = Ada pengaruh positif Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Pemda Bandung dan pemda Surabaya

H3 = Aada pengaruh positif pendapatan lain-lain yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Bandung dan DKI Jakarta

H4 = Ada pengaruh positif Pembiayaan Daerah terhadap Belanja Daerah Pemda Bandung dan pemda Surabaya.

H5 = Ada penaruh positif secara bersama-sama Pemdapatan Pajak, Dana Alokasi Umum, Pemdapatan lain-lain dan Pembiayaan Daerah terhadap Belanja Daerah Pemda Bandung dan Surabaya.

Pendekatan Keuangan

Penggunaan pendekatan keuangan ini digunakan peneliti untuk melengkapi pendekatan statistik sebagaimana di bawah ini

Pengaruh Penerimaan Terhadap Belanja Daerah

Pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan pengaruh secara parsial dan simultan dapat di rumuskan sebagai berikut.

- P1= PDI/BD(1)
- P2= DAU/BD(2)
- P3 = PLs/BD(3)
- P4 = PD/BD(4)
- P5 = (Pdi+DAU+PLs+PD)/BD(5)

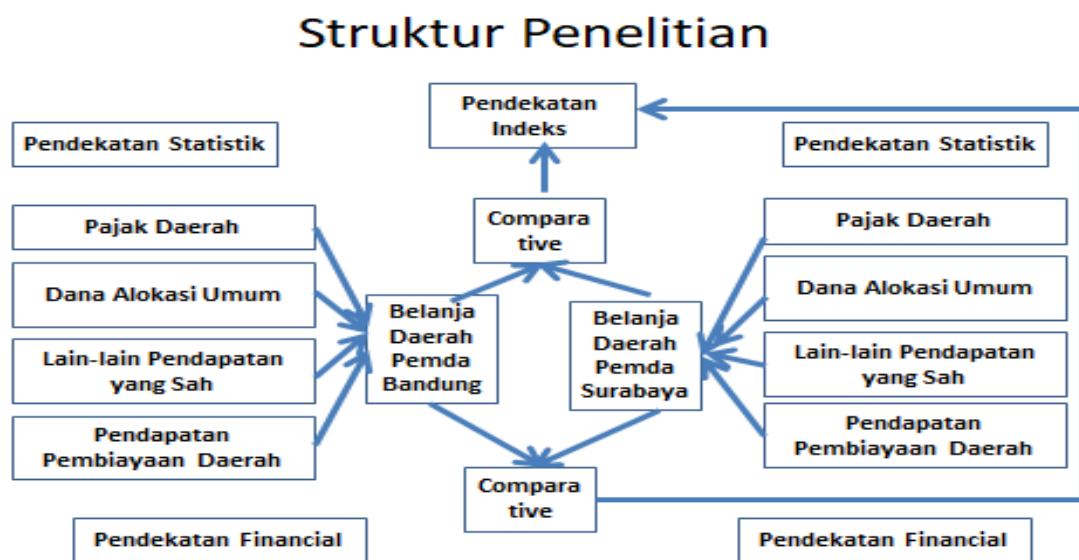
- P1 = Peranan Pajak Daerah secara parsial terhadap Belanja Daerah
- P2 = Peranan `Dana Alokasi Umum secara parsial terhadap Belanja Daerah
- P3 = Peranan Pajak Daerah secara parsial terhadap Belanja Daerah
- P3 = Peranan Pendapatan lain yang sah secara parsial terhadap Belanja Daerah
- P4 = Peranan Pembiayaan Daerah secara parsial terhadap Belanja Daerah
- P5 = Pernan penerimaan Daerah secara simultan terhadap Belanja Daerah

Klasifikasi dan Pengukuran tergantungan Belaja Daerah

Klasifikasi ini dan pengukuran didasarkan pada sekla linkerd sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu (Kurniati 2016, 1305), dan Rida Zuraid (Zuraida and Chie 2014, 1016) serta Yulianti (Yulianti and Silvy 2013, 63) dan dengan 5 tingkatan. Pemboboosn untuk mengetahui tingkatan dalam lima kategori pembobotan, di mana nilai 1 memiliki bobot 1. 2berbonot 2 3 memiliki bobot 3, serta 4 berbebot 4 dan 5 berbobot 5. Bobot ini dikecualikan untuk DAU karena semakin kecil ketergantungan Benja Daerah pada DAU berarti semakin baik belanja daerah sebagaimana tujuan otonomi daerah

Struktur Penelitian

Struktur penelitian menggunakan pendekatan statistik dan pendekatan keuangan. Kedua pendekatan saling melengkapi untuk melihat tingkat pengaruh Pendapatan Pajak Derah, Dana Alokasi Umum dan Lain-laina pendapatan yang sah serta Pendapatan Pembiayaan Daerah terhadap Belanja Daerah Pemda Bandung dan Pemda Surabaya yang mewakili daerah wisata dan daerah Industri dan Perdagangan. Hasil kedua pendekatan di lakukan studi keomperatif untuk mengetahui pemda manakah yang lebih baik dengan pendekatan indeks



Gambar 1 : Struktur Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Terhadap Pelanja Daerah

Laporan operasional keuangan daerah memperlihatkan sisi pendapatan atau pemasukan terdiri Pendapatan Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Lain Yang Sah (X3) serta Pembiayaan Daerah dan Belanja daerah tahun 2015 hingga tahun 2019 diperlihatkan di tabel 1. Dari tabel tersebut dapat digambarkan beberapa informasi keuangan sehubungan dengan empat pos penerimaan sebagai mana dibawah ini

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bandung dan Surabaya Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2015-2019 (dalam milyaran Rupiah)

Tahun	BANDUNG				SURABAYA			
	Pajak Daerah	Dana Alokasi Umum	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Pembiayaan Daerah	Pajak Daerah	Dana Alokasi Umum	Pendapatan Lain Yang Sah	Pembiayaan Daerah
2015	1.494,10	1.574,70	1.472,50	1.213,00	2.738,90	1.147,40	1.198,60	1.311,60
2016	1.709,80	1.672,50	1.088,70	994,1	3.000,20	1.233,40	794,5	1.414,90
2017	2.400,10	1.823,90	846,4	455,1	3.595,70	1.211,70	906,1	1.068,10
2018	2.160,20	1.212,00	1.180,90	601,8	3.817,40	1.211,70	1.113,50	1.202,00
2019	2.154,60	1.798,10	1.349,50	234,4	4.018,70	1.254,30	1.381,90	1.200,30
Jumlah	9.918,80	8.081,20	5.938,00	3.498,50	17.170,80	6.058,50	5.394,60	6.197,00
rata-rata	1.983,80	1.616,20	1.187,60	699,7	3.434,20	1.211,70	1.078,90	1.239,40

Catatan, diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sudah di audit BPKP

Dari tabel 1A dapat memberikan gambaran Pendapatan *Pajak Daerah* kota wisata masih lebih renda dari pada kota bisnis di bagian timur pulau jawa. Rata-rata pendapatan pajak daerah pemda Bandung dan Surabaya dalam lima tahun masing-masing 1,9 trilyun dan 3,6 trilyun dan jumlah pajak daerah yang dikumpul dalam lima tahun sebanyak 9,9 trilyun rupiah untuk bandung dan 14,4 trilyun rupiah. Dalam lima tahun jumlah total kenaikan kenaikan pajak bandung hanya setengahnya dari Pemda Surabaya. Dari tabel diatas terlihat bahwa pendapatan pajak daerah Pemda Surabaya jauh melampaun dari pada Pemda Bandung.

Berbeda dengan kemampuan pengumpulan Pajak Daerah, pendapatan *Dana Alokasi Umum* yang berasal dari APBN memperlihatkan pemda bandung memiliki tingkat ketergantungan yang lebih tinggi daripada Pemda Surabaya. Dalam lima tahun terlihat dari jumlah DAU yang lebih besar masing-masing Rp 8,0 trilyun untuk Pemda Bandung dan Rp 6,05 trilyun untuk Pemda Surabaya. DAU rata-rata bandung sebesar Rp 1,6 trilyun sementara Rp 1,2 trilyun. Dalam lima tahun jumlah kenaikan DAU sebanyak Rp 223,4 milyar atau 30,1% untuk Pemda Bandung sementara Pemda Surabaya hanya Rp 106,9 milyar atau 9,3%

Pendapatan Lain Yang Sah pada umumnya hibah dan pendapatan lainnya kedua pemda banyak memiliki perbedaan satu sama lain. Kenaikan tertinggi pendapatan jenis ini untuk pemda bandung terjadi tahun 2018 sebanyak 39,5% sementara Pemda Surabaya pada tahun 2016 dengan total kenaikan 333,7%. Total pendapatan jenis ini dalam lima tahun yang diperoleh Pemda Bandung sebesar Rp 5,9 trilyun dan Pemda Surabaya Rp Rp 5,3 trilyun sehingga rata-rata pendapatan yang diterima masing-masing Rp 1,18 trilyun dan Rp 1,07 trilyun yang artinya Pendaatan Yang Sah lainnya Pemda Bandung mampu mengungguli Pemda

Surabaya. Kenaikan dalam kurun waktu lima tahun Pemda Bandung sebesar Rp 4,5 trilyun untuk Bandung dan Rp 4,01 untuk Surabaya

Pendapatan *Pembiayaan Daerah* memperlihatkan Pemda Suarabya hampir dua kali lipat dari pada Pemda Bandung dalam hal jumlah, rata-rata pendapatan, jumlah kenaikan dan rasi kenaikan pertahun. Jumlah Pendapatan jenis ini untuk Pemda Surabaya sebear Rp 6,19 trilyun dengan jumlah rata-rata sebesar Rp 1,2 trilyun sementara Pemda Bandung hanya Rp 3,49 trilyun dengan jumlah rata-rata tidak lebih dari Rp 699,6 milyar. Pendapatan jenis ini sangat berpluktuatif. Pemda Surabaya mengalamu pluktuatif terendah sebesar minus Rp 346,8 milyar yang terjadi tahun 2017 sementara Pemda Bandung sebesar minus Rp 539 milyar . Pemda Bandung hanya sekali mengalami kenaikan positif sementara Pemda Suarabya dua kali ditahun 2016 dan 2018.

Pengeluaran *Belanja daerah* selam lima tahun berturut-turut memperlihatkan biaya daerah di dominasi tiga kelompok belanja yaitu, Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung dan Belanja Biaya Daerah. Dalam waktu lima tahun *Belanja Tidak Rutin* Pemda Bandung menyerap 44,2% dari total belanja sementara Pemda Surabaya hanya 27,1% dimana pengeluaran tersebut di dominasi oleh Belanja Pegawai sebanyak 38,8% untuk dan 25,2% masing-masing untuk Pemda Bandung dan Surabaya. Dari data tersebut terlihat Pemda Bandung memiliki kebebasan yang lebih kecil untuk membiayai belanja rutin dan pembiayaan daerah, hal ini terlihat biaya subsidi rata-rata hanya 1,5%, belanja hibah 3,5%, Bansos, Bagi hasil, dan bantuan keuangan serta pengeluaran tidak terduga tidak ada sama sekali. Belanja rutin yang biasanya dialokasikan untuk belanja 1) pegawai, 2)barang dan jasa 3) serta belanja modal dalam lima tahun rata-rata total sebesar 47,2% untuk Pemda Bandung dan Pemda Surabaya 59,73% yang berarti bahwa Surabaya mempunyai alokasi yang lebih baik untuk tiga jenis biaya tersebut.

Deskriptif secara statistik jika variabel Pajak daerah sebagai X1, Dana Alokasi Umum sebagai X2, Pendapatan lain yang sah sebagai X3 dan Pembelanja Daerah sebagai X4 serta Belanja Daerah sebagai Y maka deskriptip variabel tersebut akan terlihat sebagaimana tabel 2 dibawah ini

Tabel 2 Deskripsi Pendapatan Pajak, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Yang Sah Dan Pembangunan Daerah Serta Belanja Daerah Tahun 2015-2019 Dalam Milyaran Rupiah

Daerah	Pendapatan	N	Minimu m	Maxim um	Mean	Std. Deviation
Bandung	Pajak Daerah (X1)	5	1494	2400	1983,76	370,296
	Dana Alokasi Umum (X2)	5	1212	1824	1616,24	247,233
	Pendapatan lain yang Sah(x3)	5	846	1473	1187,60	241,673
	Pembelanjaan Daerah (X4)	5	234	1213	699,68	398,769
	Belanja Daerah (Y)	5	5950	6523	6350,86	241,022
	Valid N (listwise)	5				
Surabaya	Pajak Daerah (X1)	5	2739	4019	3434,18	544,601
	Dana Alokasi Umum (X2)	5	1147	1254	1211,70	40,063
	Pendapatan lain yang Sah(X3)	5	795	1382	1078,92	233,494
	Pembelanjaan Daerah (X4)	5	1068	1415	1239,38	130,656
	Belanja Daerah (Y)	5	7777	10363	9009,14	962,233
	Valid N (listwise)	5				

Sumber, data dioleh berasal dari data primer yang digunakan dalam penelitian

Dari tabel 2 dapat dikethui bahwa 1) jumlah minimal terkecil untuk Pemda Bandung adalah X4 sebesar 234 juta sementara untuk pemda Surabaya untuk Pendapatan Lain yang sah sebesar 795. Juta untuk X3. Dan terlihat bahwa secara nominal jumlah minimal tersebut

masih lebih tinggi daripada Jumlah minimal di pemda Bandung. 2) Jumlah maksimal Pemda Bandung untuk variabel terikat Pendapatan Pajak Daerah sebesar 2,400 Trilyun Rupiah untuk X1 sementara untuk Pemda Surabaya sebesar 4,019 trilyun rupiah untuk X1 untuk kelompok yang sama. Kondisi tersebut disebabkan pendapatan pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan daerah. 3) Jumlah rata-rata Pendapatan Daerah Pemda Surabaya lebih besar untuk kesemua jenis pendapatan daripada rata-rata pendapatan yang diperoleh Pemda Bandung. 4) jumlah N untuk setiap variabel dependen dan independen memiliki jumlah yang sama 5) Jumlah rata-rata Belanja Daerah Pemda Surabaya lebih besar daripada Belanja Daerah pemda Bandung masing-masing 9,009,1 trilyun rupiah dan 6,350 Trilyun Rupiah. Dari tabel tersebut dapat dipahami bahwa a). Perbedaan mean kedua Pemda tersebut memperlihatkan Pajak Daerah Pemda Bandung lebih Rendah dan perbedaan tersebut sebesar 1,45 trilyun Rupiah. b). Mean Dana Alokasi umum Pemda Bandung masih diatas Pemda Surabaya dan perbedaan keduanya adalah 404,54 milyar Rupiah. c). Mean Pendapatan lain yang sah Pemda Bandung lebih tinggi dari pada Pemda Surabaya dan jumlah perbedaan tersebut sebesar 108,68 milyar Rupiah. d). Mean Pembelanjaan Daerah menunjukan pemda Bandung tidak lebih besar dari pada Surabaya dan perbedaan tersebut sebesar Rp 539,7 milyar dan secara keseluruhan memperlihatkan rata-rata Belanja Daerah Pemda Bandung lebih rendah dari pada Pemda Surabaya. Perbedaan tersebut sebesar Rp 2,658 trilyun

Pengaruh Pajak Daerah, (PjD) Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Yang Sah (PS) Dan Pembangunan Daerah (PbD) serta Pembelanjaan Daerah (PD) terhadap Belanja Daerah Pemda

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PjD, DAU, PS, dan PbD serta PD terhadap Belanja daerah yang masing-masing sebagai X1,X2, X3, X4 dan Y dapat di lakukan dengan dua pendekatan yaitu, Pendekatan stastistik dan pendekatan keuangan. Pendekatan statistik menggunakan model liner berganda baik secara partial dan secara simultan. Secara simultan akan diperoleh informasi besarnya pengaruh X1,X2,X3 dan X4 secara bersama-sama terhadap Y dalam bentuk rasio, tetapi secara partial bisa dilakukan dengan pendekatan metode linear sederhana. Cara lain dilakukan dengan pendektan keuangan. Hasil analisis regresi berganda memperlihatkan

Tabel 3 Coefficients Pendapatan Pajak Daerah, DAU dan Pendapatan yang sah lainnya serta Prmbgunsn Daerah Pemda Bandung dan Surabaya

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1114,031	1774,011		,628	,558
	Pajak Daerah (X1)	1,525	,185	,868	8,239	,000
	Dana Alokasi Umum (X2)	,107	,728	,019	,147	,889
	Pendapatan sah lainnya (X3)	1,041	,549	,155	1,896	,117
	Pembangunan Daerah (X4)	1,139	,416	,293	2,740	,041
R Square		,968		Annova	,001^b	

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Dari tabel 3 dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang kuat antara Pendapatan Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Sah Lainnya dan Pembangunan Daerah secara simultan dengan Belanja Daerah (H5). Besarnya pengaruh tersebut 96,8% dan 3,2% dipengaruhi oleh faktor lainnya di luar variabel penelitian, Lihat R Square 0,968 Analisis annova memperlihatkan $001 < 0,05$ memperlihatkan bahwa pengaruh antara variabel independan dan dependen dalam keadaan signigicant

Hipotesis penelitian

- Hipotesis penelitian ini dan sesuai dengan banyaknya variabel terdiri dari
- H1 = Adanya pengaruh positif Pendapatan Pajak daerah terhadap Belanja Daerah Pemda Bandung dan pemda Surabaya dapat diterima karena karena tingkat singnificant menunjkan $000 < 0,05$. Besarnya pengaruh Pendapatan Pajak terhadap Belanja daerah kedua pemda secara bersama adalah 0,868
 - H2 = Tidak Ada pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Pemda Bandung dan pemda Surabaya
 - H3 = Tidak ada pengaruh positif sebesar Pendapatan Lain-Lain Yang Sah terhadap Belanja daerah Pemda Bandung dan Surabaya sehingga H3 tidak dapat diterima
 - H4 = Ada pengaruh positif Pembiayaan Daerah terhadap Belanja Daerah Pemda Bandung dan pemda Surabaya dapat diterima dan pengaruh Pembiayaan Daerah terhadap Belanja Daerah tersebut signifcant karena $0,041 < 0,05$. Besarnya pengaruh tersebut adalah 0,293
 - H5 = Ada penaruh positif secara bersama-sama Pemdapatan Pajak, Dana Alokasi Umum, Pemdapatan lain-lain dan Pembiayaan Daerah terhadap Belanja Daerah Pemda Bandung dan Surabaya dimana R Square menunjkan angka 0,968 yang artinya X_1, X_2, X_3 dan X_4 memberikan pengaruh sebanyak 96,8% terhadap belanja daerah

Kesimpulan diatas tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti, Salmah Pattisahusiwa yang berkesimpulan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan tidak pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini memiliki kesimplan yang sama dengan Rihfenti Ernayani yang menyatakan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap belanja daerah dan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur yang berkesimpulan PAD dan DAK secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Sementara DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah

Ketergantungan Belanja Daerah dengan Sumber Penerimaan Darah

Tabel 3 memperlihatkan bahwa Belanja Daerah Pemda Bandung dan Surabaya secara bersama-sama dipengaruhi oleh empat jenis pendapatan sebesar 96,8% dan sisanya bergantung pada yang lain di luar variabel, atau dengan kata lain belanja daerah bergantung 96,8% dari empat jenis pendapatan. Ketergantungan tersebut apabila diklasifikasikan menurut pemerintahan daerah tampak sebagai berikut

Tabel 4 Pengaruh Pajak daerah, DAU, Pendapatan Lain dan Pembiayaan Daerah Terhadap Belanja Daerah

Pemda	Tahun	Pajak Daerah	Dana Alokasi Umum	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Pembiayaan Daerah	Jumlah /Total (simultan)	Jumlah Belanja
Bandung	2015	23,72%	25,00%	23,37%	19,25%	91,34%	100,00%

	2016	26,27%	25,70%	16,73%	15,28%	83,98%	100,00%
	2017	40,34%	30,65%	14,22%	7,65%	92,86%	100,00%
	2018	33,12%	18,58%	18,10%	9,23%	79,03%	100,00%
	2019	33,28%	27,78%	20,85%	3,62%	85,52%	100,00%
	Jumlah	156,73%	127,71%	93,28%	55,03%	432,74%	500,00%
	rata-rata	31,24%	25,45%	18,70%	11,02%	86,40%	100,00%
Surabaya	2015	35,22%	14,75%	15,41%	16,87%	82,25%	100,00%
	2016	35,10%	14,43%	9,30%	16,56%	75,39%	100,00%
	2017	40,04%	13,49%	10,09%	11,89%	75,51%	100,00%
	2018	40,70%	12,92%	11,87%	12,82%	78,31%	100,00%
	2019	38,78%	12,10%	13,33%	11,58%	75,80%	100,00%
	Jumlah	189,84%	67,70%	60,01%	69,71%	387,26%	500,00%
	rata-rata	37,97%	13,54%	12,00%	13,94%	77,45%	100,00%

Sumber, diolah berdasarkan dari laporan keuangan pemda

Dari tabel 4 dapat secara parsial dan simulatan ketergantungan Belanja Daerah pada Pajak Daerah, DAU, pendapatan Lain Yang Sah dan Pembangunan Daerah secara simultan maupun parsial maupun bersama-sama memperlihatkan

Pendapatan Pajak Daerah

Secara parsial Belanja Daerah memiliki tingkat ketregantungan yang tidak sama pada pendapatan pajak. Ketergantungan terbesar 40,34% dan terkecil 23,72% dan dalam lima tahun rata-rata 31,24%. Faktaini berbeda dengan Pemda Surabaya dimana ketergantungan terendah sebesar 35,22% dan terbesar sebesar 40,7% sehingga ketergantungan rata-rata dalam lima tahun sebesar 37,97%. Data tersebut memberikan gambaran tingkat ketergantungan Belanja Daerah Bandung pada bukan Pendapatan Pajak Daerah cukup tinggi tidak sebagaimana Pemda Surabaya. Perbedaan ketergantungan Belanja Daerah terhadap Pendapatan Pajak Daerah sebesar 6,7%

Dana Alokasi Umum

Ketergantungan Belanja Daerah terhadap Dana Alokasi Umum memperlihatkan Belanja Daerah Pemda Bandung lebih tinggi dari pada Pemda Surabaya dari tahun 2015-2019. Ketergantungan terkecil terjadi pada tahun 18,58% tahun 2018 dan terbesar sebesar 30,65%. Rata-rata dalam 5 tahun sebesar 24,45%. Sementara ketergantungan Belanja Daerah pemda Surabaya pada PAD bergerak antara 12,10% hingga 14,7% dengan ketergantungan rata-rata 13,54%. Tebel diatas memberikan gambaran bahwa Ketergantungan Belanja Daerah Surabaya jauh lebih rendah dari pada Pemda Bandung pada Dana Alokasi Umum

Pendapatan Lain Yang Sah

Ketergantungan Belanja Daerah pada Pendapatan Yang Sah lainnya memperlihatkan Pemda Bandung memperlihatkan memiliki ketergantungan yang lebih tinggi dari pada Pemda Surabaya. Ketergantungan terkecil 14,22% dan terbesar 23,37% dan rata-rata dalam lima tidak lebih dari 18,7%. Sementara Ketergantungan Belanja Daerah Surabaya terhadap Pendapatan Yang Sah lainnya hanya 12,0% dengan tingkat variance ketergantungan sebesar 6,7%

Pembiayaan Daerah

Ketergantungan Belanja Daerah terhadap Pembiayaan Daerah kedua Pemda memperlihatkan posisi yang berimbang. Ketergantungan Belanja Daerah Pemda Bandung bergerak mulai dari 7,65% hingga 19,25%. Ketergantungan tertinggi terjadi pada tahun 2015 dan terendah pada tahun 2017. Ketergantungan Belanja Daerah rata-rata untuk Pemda Bandung sebesar 11,02%. Sementara untuk Pemda Surabaya sebesar 12,%. Perbedaan ketergantungan Belanja Daerah keduanya tidak sampai 1%.

Ketergantungan Simultan

Adalah sampai sejauh mana ketergantungan Belanja Daerah terhadap pendapatan pajak daerah, DAU, Pendapatan Lain Yang Sah dan Pembangunan Daerah Pemda Bandung dan Pemda Surabaya. Tabel 4 memberikan informasi tingkat ketergantungan Belanja Daerah terhadap empat jenis penerimaan diatas dalam lima tahun terakhir sebesar 86,4% untuk Pemda Bandung dan 77,45% untuk Pemda Surabaya dengan tingkat variansi 8,95%. Data tersebut memperlihatkan pemda Surabaya lebih mampu memperkecil ketergantungan dalam belanja daerah sebesar 22,55% sementara Pemda Bandung sebesar 13,6%.

Kualitas Ketergantungan Belanja Daerah

Belanja Daerah dapat berjalan sangat bergantung dari kualitas komponen penerimaan daerah penting yaitu Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Lain yang Sah dan Pembangunan Daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu komponen utama dalam Penerimaan Asli Daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah dalam Belanja Daerah berarti semakin baik dan semakin mandiri pendanaan pembangunan. Prinsip penilaian adalah semakin kecil ketergantungan belanja daerah maka skor yang dimiliki semakin besar kecuali untuk Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Lain yang Sah, karena semakin besar ketergantungan pada pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan lainnya yang Sah maka ketergantungan Belanja Daerah semakin baik.

Tabel 5 Kualifikasi dan Ketergantungan Belanja Daerah Pemda Bandung dan Pemda Surabaya

Penerimaan Daerah	Presentae Rata-rata		Nilai		Bobot	
	Bandung	Surabaya	Bandung	Surabaya	Bandung	Surabaya
Pajak Daerah Bandung	0,00%	0,00%	2,6	4,6	2,6	4,6
Pendapatan lain yg sah	18,66%	12,00%	3,8	1,6	2,2	4,4
DAU	25,54%	13,54%	4,0	1,0	2,0	5,0
Pembiayaan Daerah	11,0%	12,0%	2,8	3,4	3,2	2,2
Jumlah			13,2	10,6	10,0	16,2

Catatan, di oleh dari Laporan Keuangan Pemda Bandung dan Pemda Surabaya tahun 2-15-2019

Dari tabel 5 tersebut, Analisis ketergantungan Belanja Daerah kedua pemerintahan daerah menunjukkan sebagaimana berikut. 1) Ketergantungan Belanja Daerah pada pendapatan Pajak Daerah pemda menunjukan Surabaya pada posisi lebih baik. Rata-rata angka ketergantungan tersebut 37,97% sementara Pemda Bandung hanya sebesar 31,24%. Karena prinsip otonomi adalah daerah mampu membiayai diri sendiri maka semakin besar pendapatan Pajak Daerah semakin besar kemampuan belanja daerah membiayai pembangunan. Kualifikasi penilaian memperlihatkan Pemda Bandung hanya 13 semetara Surabaya berjumlah 23 atau bila dirata-ratakan skor Pemda Bandung sebear 2,6 dan Surabaya sebear 4,6.

Ketergantungan Belanja Daerah pada Pendapatan Yang Sah lainnya memperlihatkan rata-rata 18,66% untuk Pemda Bandung dan 12.% untuk Pemda Surabaya. Ketergantungan

Belanja Daerah terkecil untuk Bandung 14,22% dan terbesar 20,85% untuk Pemda Surabaya, Total Skor yang dimiliki masing-masing 19 dan 8 sehingga nilai rata-rata Pemda Bandung sebesar 3,8 dan Pemda Surabaya 1,6. Begitu juga ketergantungan Belanja Daerah pada Dana Alokasi Umum dalam lima tahun memperlihatkan jumlah yang berbeda-beda. Pemda yang baik adalah Pemda yang memiliki Dana Alokasi Umum yang rendah, semakin DAU rendah maka skor semakin tinggi. Pemda Bandung memperlihatkan semakin lama semakin kecil yang berarti manajemen keuangan Bandung semakin baik. Dan Surabaya memperlihatkan tingkat ketergantungan Belanja Daerah masih di atas Pemda Bandung karena angka ketergantungan Pemda Surabaya lebih rendah. Pemda Bandung memiliki skor rata-rata 5 sementara Pemda Bandung hanya memiliki skor 2,0. Total skor masing-masing dalam 5 tahun 10 dan 25.

Pembiayaan Daerah merupakan salah satu sumber Penerimaan Daerah yang memiliki ketergantungan pada Belanja Daerah. Rata-rata ketergantungan Belanja Daerah terhadap pembiayaan daerah Pemda Bandung dalam lima tahun 11% sementara Pemda Surabaya sebesar 12%. Ketergantungan tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 19,25% dan terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 3,62%. Ketergantungan Belanja Daerah Surabaya terbesar terjadi tahun 2015 sebesar 15,41% dan terendah pada tahun 2016 sebesar 9,30%. Dengan tingkat ketergantungan tersebut jumlah skor penilaian yang diperoleh Pemda Bandung lebih besar dari pada Pemda Surabaya masing-masing 3,2 dan 2,2.

Secara agregat ketergantungan Belanja Daerah terhadap Pajak Daerah, Pendapatan Lain yang Sah dan DAU serta Pembiayaan daerah menunjukan Pemda Surabaya lebih baik dari pada Pemda Bandung dimana Pemda Surabaya memperoleh total nilai sebesar 13,4 dan Pemda Bandung sebesar 11,6. Hasil ini memperlihatkan manajemen sumber pendanaan dan belanja daerah Pemda Surabaya masih lebih baik dari pada Pemda Bandung

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini memberi kesimpulan

Pendapatan Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan yang Sah Lainnya serta Pembangunan Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah tetapi hanya Pajak Daerah dan Dana Pembangunan Daerah yang berpengaruh secara significant. Besarnya pengaruh tersebut sebesar 96,8% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian. Pengaruh secara parsial memperlihatkan a) Pendapatan Pajak daerah terhadap Belanja Daerah Pemda Bandung dan Pemda Surabaya pengaruh secara bersama 0,868 b). Ada pengaruh positif antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Daerah Pemda Bandung dan Pemda Surabaya karena tingkat Sign $0,889 > 0,05$. Besarnya pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah adalah 0,019. c) Ada pengaruh positif sebesar Pendapatan Lain-Lain yang Sah terhadap Belanja daerah Pemda Bandung dan Surabaya sebesar 0,155 dan d). Terdapat pengaruh positif Pembiayaan Daerah terhadap Belanja Daerah Pemda Bandung dan Pemda Surabaya besarnya pengaruh tersebut adalah 0,293.

Dalam waktu lima tahun ketergantungan Belanja Daerah rata-rata dari Pendapatan Pajak Daerah untuk Pemda Bandung sebesar 31,24% dan 37,97% untuk Pemda Surabaya. Sementara ketergantungan pada Dana Alokasi Umum sebesar 25,45% dan 13,54% masing-masing untuk Pemda Bandung dan Pemda Surabaya. Dan ketergantungan pada Pendapatan lain-lain yang sah untuk Pemda Bandung sebesar 18,75% dan 12,0% untuk Pemda Surabaya. Ketergantungan pada pendapatan yang berasal dari Pembiayaan Daerah Pemda Bandung dan Pemda Surabaya masing-masing 11,02% dan 13,94% dan Ketergantungan Belanja Daerah Pemda Bandung terhadap Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Lain yang Sah serta Pembangunan Daerah secara simultan sebesar 86,40%. Dan untuk Pemda Surabaya sebesar 77,45%.

Posisi skor Belanja Daerah Pemda Surabaya lebih baik dari pada Bandung karena memiliki nilai yang lebih tinggi. Nilai tersebut 16, 2 berbanding 10,0. Secara rinci tercatat bahwa Penerimaan Pajak Daerah Pemda Bandung lebih rendah dari pada Pemda Surabaya masing masing 13 berbanding 23. Sementara untuk Pendapatan Yang Sah memperlihatkan Pemda Bandung memiliki keunggulan lebih dari dua kali lipat dari pada Pemda Surabaya dimana masing masing 19 dan 8 tetapi dalam hal Dana Alokasi Umum memperlihatkan Pemda Surabaya jauh lebih unggul dengan nilai bobot 25 sementara Pemda Bandung hanya memiliki nilai bobot 10. Dalam hal Pendapatan yang berasal dari Pembiayaan Daerah terlihat Pemda Bandung lebih unggul dengan jumlah bobot 16 sementara Pemda Surabaya hanya sebesar 11

Saran

Saran dalam penelitian ini yang bisa diberikan untuk Pemda Bandung adalah pemda yang banyak mengelola daerah wisata dan basis pendapatan berkaitan dengan wisata. Mean Pajak Daerah Pemda Bandung memperlihatkan jumlah yang lebih rendah dari pada Pemda Surabaya memberikan gambaran sumber pendapatan Pajak Daerah belum optimal dan perlu dioptimalkan kembali. Optimalisasi tersebut adalah menggenjot pendapatan pajak resotan, hiburan dan wisata, pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan. Dan . diantara jenis pendapatan tersebut yang paling mungkin untuk ditingkatkan adalah pendapatan pajak berbasis Pariwisata

Tingkat ketergantungan pembangunan Pemda Bandung lebih tinggi dari pada tingkat ketergantungan Pemda Surabaya. Ketergantungan Pemda Bandung memperlihatkan antara 83,9% -91,34% sementara Pemda Surabaya berkisar antara 75,39% - 91,34%. Data tersebut Pemda Bandung seharusnya berusaha mengurangi tingkat ketergantungan pada sumber pendapatan dengan cara meningkatkan sumber pendapatan yang ada, mencari sumber – sumber pendapatan atau merasionalkan jumlah pengeluaran pembangunan sesuai dengan jumlah penerimaan pendapatan daerah

Secara keseluruhan total skor penilaian Pemda Bandung masih lebih rendah karena total belanja Pemda Bandung lebih rendah dari Pemda Bandung. Untuk memperbaiki skor penilaian Pemda Bandung berusaha meningkatkan Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum dan untuk Pemda Surabaya dapat meningkatkan pos Pendapatan yang sah dan Pendapatan Pembiayaan Daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Adyatma, Erdi, and Rachmawati Meita Oktaviani. 2015. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi." *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan* 4 (2): 190–205.
- Agustina, Oesi. 2013. "Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011) Disusun Oleh:" *Fakultas Ekonomi Universitas Brawijayaa*.
- Ahmad, Srifatmawati. 2021. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Di Kota Makassar." *Journal.Lldikti9.Id/Ekonomika* 5 (1): 2685–6891.
- AKBAR, SURYA. 2016. "ANALISA PENETAPAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH DIKABUPATEN INDRA GIRI HILIR." *입법학연구 제13집 1호* (May): 31–48.
- Albugis, febriana F. 2016. "Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal EMBA* 4 (3): 78–89.
- Andina, Elga. 2019. "Analisis Perilaku Pemilahan Sampah Di Kota Surabaya." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 10 (2): 119–38. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v10i2.1424>.

- Ardiana, I.D.K.R, I.A Brahmayanti, and Subaedi. 2010. "Kompetensi SDM UKM Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UKM Di Surabaya." *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 12 (1): pp.42-55. <https://doi.org/10.9744/jmk.12.1.pp.42-55>.
- As Syifa Nurilah, dul Muid. 2014. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Akunatnsi Keuangan , Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan." *Journal Of Accounting* 3 (2): 2337–3806.
- Butarbutar, Tarida Elisa. 2014. "'Analisa Peranan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Tomohon.'" *Jurnal EMBA* 2 (4): 697–704.
- Fajar Nugroho, Abdul Rohman. 2012. "PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAPPERTUMBUHAN KINERJA KEUANGAN DAERAHDENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING(Studi Kasus Di Propinsi Jawa Tengah)." *JOURNAL OF ACCOUNTING DIPONEGORO* 1 (1): 1–14.
- Fazlurahman, Faesal, Chandra Fatriananda, and Rifqie Jauhari. 2020. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Sebelum Dan Setelah Mendapatkan Opini WTP Dari BPK." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* 11 (1): 56. <https://doi.org/10.36982/jiegmk.v11i1.1062>.
- Hadi, Seno Sudarmono, and Restiyana Dyah Ayu Saputri. 2018. "Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada BPRD DKI Jakarta." *Jurnal BSI* 5 (2): 185–94.
- Hidayat, Muhamad Fajar. 2016. *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belnja Modal (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur). Fakultas Ekonomi Universitas Brawijayaa*.
- Indira, Dian, Slamet Usman Ismanto, and Meilanny Budiarti Santoso. 2013. "Pencitraan Bandung Sebagai Daerah Tujuan Wisata: Model Menemukanali Ikon Bandung Masa Kini." *Sosiohumaniora* 15 (1): 45. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v15i1.5238>.
- Kurniati, Ida Ayu Emmy. 2016. "Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 16 (1): 1290–1318.
- Kustianingsih, Nurafni, Muslimin, and Abdul Kahar. 2018. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah." *Katalogis* 6 (6): 82–91.
- Leonardus Julyano Sema, Akhmad Riduawan. 2021. "Analisis Flypaper Effect Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal." *Jurnal Ilmu Dan Riset* <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3985%0Ahttp://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/3985/3996>.
- Marfiana, Nandhya, and Lulus Kurniasih. n.d. "PEMERIKSAAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA."
- Maylanny, Christin, and Siti Faridani Fauzan. 2015. "City Branding Kota Bandung Melalui Bus Bandros." *Jurnal Komunikator* Vol.7 No. (1): 88–92. <https://libraryproceeding.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/3350>.
- Miftahul Abid, Sri Rahayu, Wiwin Aminah. 2018. "PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP REALISASI ANGGARAN BELANJA MODAL." *E-Proceeding of Management* 5 (1): 75.
- Mosal, Mourin M. 2013. "Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Penerapan Akuntansi Di Kota Manado." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1 (4): 374–82.
- Munir, Misbahul. 2016. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal." *Kalbis Sosio*.

- Mutiha, Arthaingan. 2016. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 -2014." *Jurnal Vokasi Indonesia* 4 (2). <https://doi.org/10.7454/jvi.v4i2.101>.
- N. Taguchi^{1, 2}, M. Kawabata¹, M. Maekawa³, T. Maruo², Aditiawarman⁴ and L. Dewata. 2003. "Influence of Socio-Economic Background and Antenatal Care Programmes on Maternal Mortality in Surabaya, Indonesia." *Tropical Medicine and International Health* volume 8 (9): 847–52.
- Pangerapan, Herly, and dan Heince R. N. Wokas. 2016. "Pajak Parkir Dan Pajak Air Tanah Sebagai Sumber." *Jurnal EMBA* 4 (1): 732–41.
- Perdana, Tito Aditya, Risanda A Budiantoro, Febrianur Ibnu, and Fitroh Sukono. 2020. "Mengukur Kinerja Apbd Kota Surabaya Analisis Value for Money Measuring the Performance of APBD in the City of Surabaya , Analysis of Value for Money" 16 (2): 339–46.
- Pujiono, Dodik Slamet, Hari Sukarno, and Novi Puspitasari. 2016. "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Di Provinsi Maluku Utara)." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 10 (1): 68–81. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BISMA/article/download/5956/4417/>.
- Purpitasari, Puput. 2015. "PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAHNo Title." *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 4 (11): 1–11.
- Riftiasari, Dinar. 2018. "YAYASAN AKRAB PEKANBARU ANALISA KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA -----". *Jurnal AKRAB JUARA Volume 3 Nomor 3 Edisi Agustus 2018 (190-200)* 3 (3): 190–200.
- Rinaldi, Udin. 2012. "Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah." *EKSOS* 8 (2): 105–13.
- Rusmita, Sari. 2016. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Kalimantan Barat." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* 5 (3): 237. <https://doi.org/10.26418/jebik.v5i3.19083>.
- Sandy Kawulur, Rosalina A. M. Koleangan, Patr. 2019. "ANALISA PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA DESA DALAM MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN DI 11 KABUPATEN PROVINSI SULAWESI UTARA." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 19 No. 03 Tahun 2019* 19 (3).
- Santoso, Cahyo Budi. 2014. "ANALISA KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2009-2013 Fakultas Ekonomi, UNRIKA." *Jurnal Measurement Vol. 8 No.2 - Juni 2014 | ISSN: 2252-5394* 8.
- Satrya, Dewa Gde, and Agoes Tinus Lis Indrianto. 2016. "CSR Untuk Cagar Budaya Surabaya." *Jurnal Ilmiah Pariwisata -STP Trisakti* 21 (1): 47–61.
- Setia, Azhar Karya. 2008. "Analisis Kinerja Keuangan PPemerintah Daerah/Kota Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah." *Pascasarjana Universitas Sumatera Utara*.
- Surakhman, A, Abid Djazuli, and Choiriyah. 2019. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Palembang." *Kolegial* 7 (2): 150–66.
- SUSANTO, I DEWA GDE BISMA HERY. 2010. "EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2003 – 2007No Title." *Ganeç Swara* Vol. 4 (3): 75–86.
- Syafri, Harahap Sofyan. 2011. *Teori Akuntansi*.
- Syarifuddin, Didin, Chairul M. Noor, and Acep Rohendi. 2017. "Memaknai Kuliner Lokal Sebagai Daya Tarik Wisata." *Abdimas* 1 (1): 4–8. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/abdimas>.
- Urip Santoso, Yohanes Joni Pambelum. 2008. "Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah." *Jurnal Administrasi Dan Bisnis* 4 (1):

216–1249.

- Wati, Kadek Desiana, Nyoman Trisna Herawati, and Ni Kadek Sinarwati. 2014. "Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Dan SAKD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah." *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha 2* (1): 1–11.
- Wijaya, Ida Bagus Agastya Brahmana, and I Ketut Suidiana. 2016. "Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerimaan Pajak Hotel, Restoran Dan Pendapatan Retribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bangli Periode 2009-2015." *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana 5* (12): 1384–1407.
- Williantara, Gede Ferdi, and I Gede Ayu Nyoman Budiasih. 2016. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Pada Indeks Pembangunan Manusia." *E-Jurnal Akuntansi 16* (3): 2044-2070–2070.
- Williantara1, Gede Ferdi, and I Gusti Ayu Nyoman Budiasih2. 2016. "PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL PADA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayan Vol.16*. (3): 2044–70.
- Yulianti, Norma, and Meliza Silvy. 2013. "Sikap Pengelola Keuangan Dan Perilaku Perencanaan Investasi Keluarga Di Surabaya." *Journal of Business and Banking 3* (1): 57–68.
- Zuraida, Rida, and Ho Hwi Chie. 2014. "PADA RESPONDEN DI INDONESIA" *5* (9): 1012–20.